**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG TERJADI DI HOTEL**

**Skripsi**

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan***

***untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

****

**Diajukan Oleh:**

**KHARISMA OKTAVIANI**

**NPM. 2110012111085**

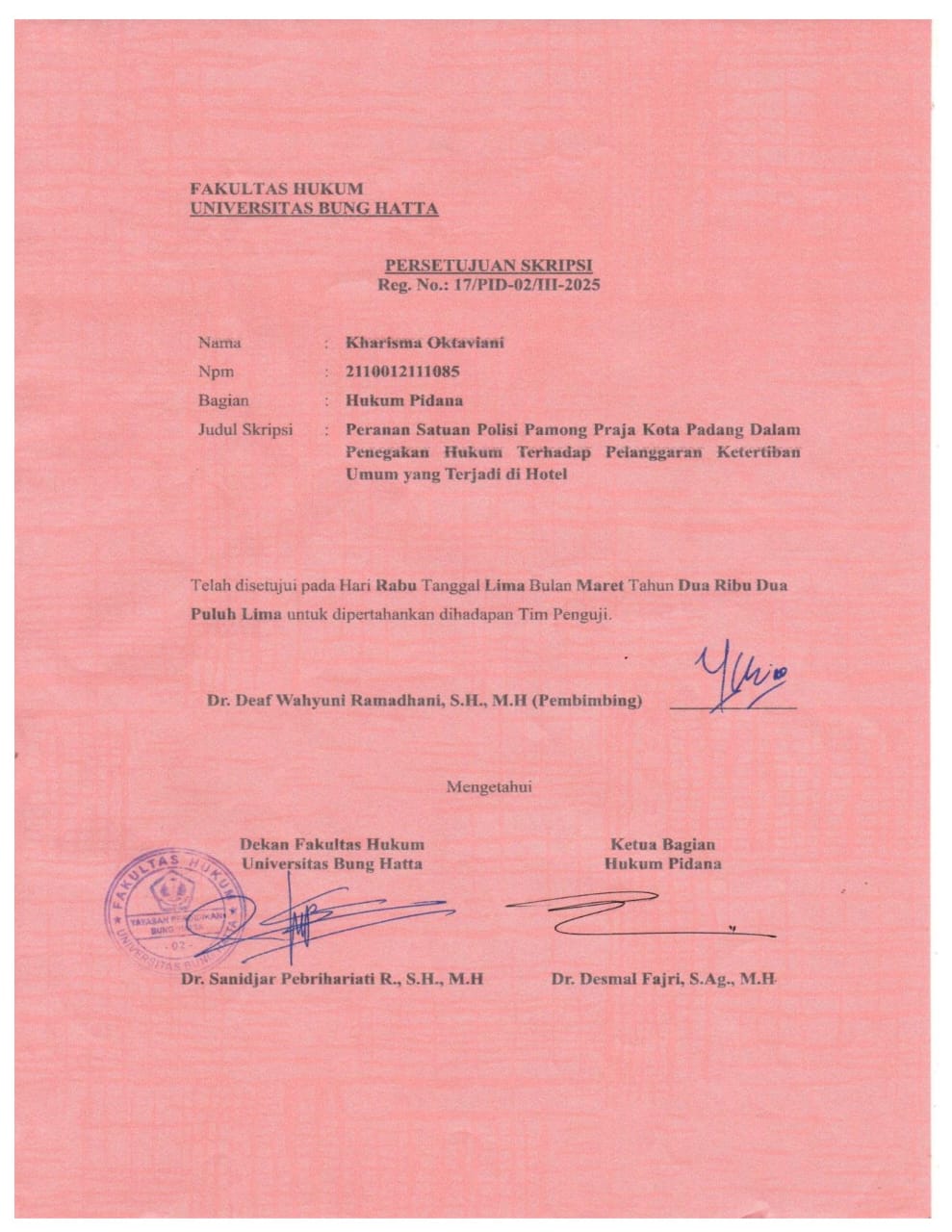
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

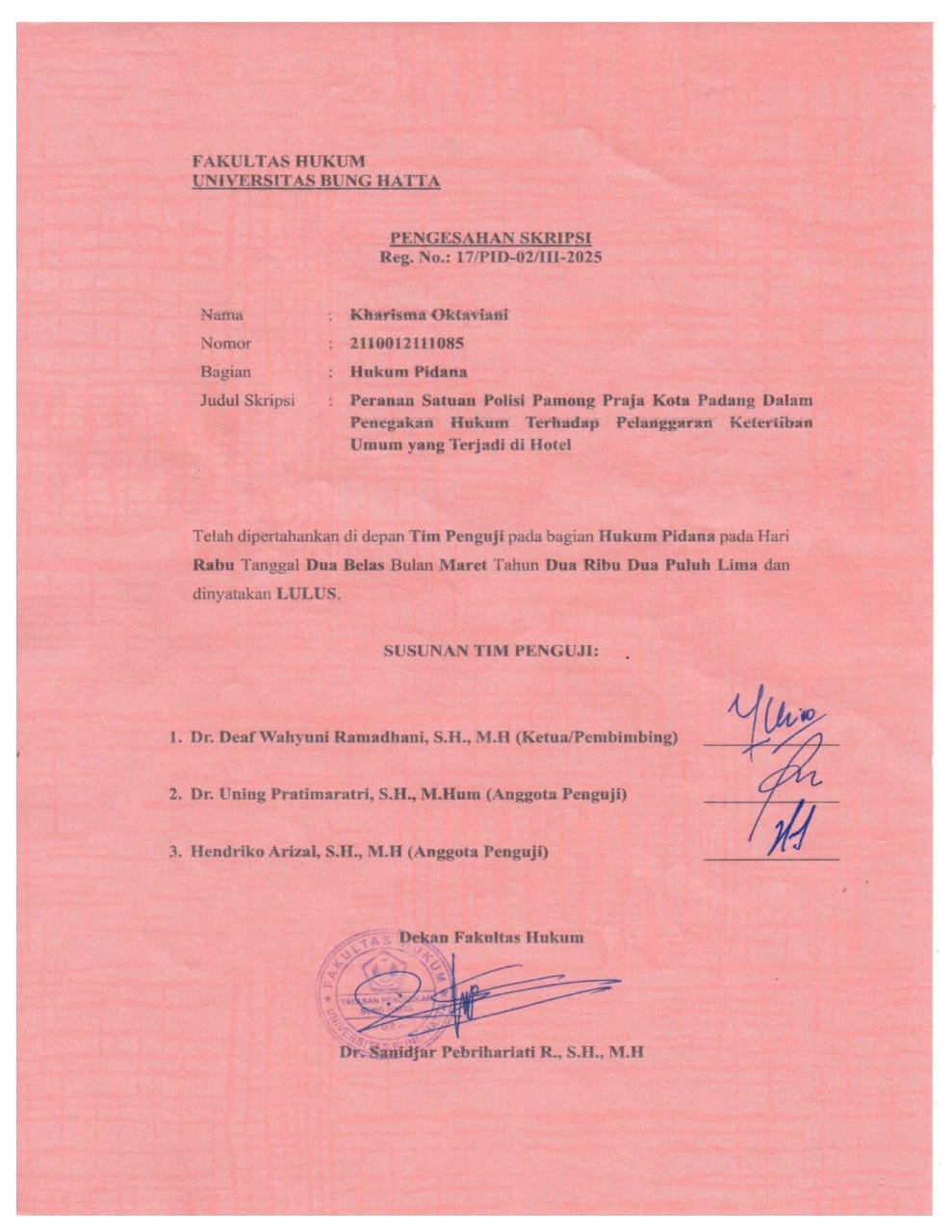
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

****

****

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI HOTEL**

Kharisma Oktaviani1, Deaf Wahyuni Ramadhani1

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [kharismaoktaviani2@gmail.com](mailto:kharismaoktaviani2@gmail.com)

# ABSTRAK

# Dalam upaya Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, tindakan penerbitan non-yudisial dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Beberapa penginapan dan hotel di Kota Padang terindikasi telah melakukan pelanggaran ketertiban, hotel menerima tamu pasangan illegal yang berhasil dijaring petugas salah satunya sebuah hotel berbintang 3 yang berlokasi di Kelurahan Pondok. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel? (2) Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang dilakukan melalui: peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa; (2) Dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Satpol PP tidak menentukan jadwal tetap, karena pengawasan dan penertiban dilakukan berdasarkan informasi dari intelijen dan laporan masyarakat.

***Kata Kunci:*** *Satpol PP, Ketertiban Umum, Hotel*

**THE ROLE OF THE PADANG CITY PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF PUBLIC ORDER IN HOTELS**

Kharisma Oktaviani1, Deaf Wahyuni Ramadhani 1   
Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta   
E-mail:[kharismaoktaviani2@gmail.com](mailto:kharismaoktaviani2@gmail.com)

***ABSTRACT***

*In the effort of Satpol PP to maintain and/or restore public order and peace of mind against violations of the Regional Regulation and/or Perkada, non-judicial issuance actions are carried out in accordance with the provisions of the law. As stipulated in Padang City Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Public Order. Several inns and hotels in Padang City are indicated to have violated order, the hotel received guests from an illegal couple who were caught by officers, one of which was a 3-star hotel located in Pondok Village.* *Research problems: (1) What is the role of the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? The type of research used is empirical juridical; data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews; data is analyzed qualitatively.* *The results of the study show: (1) The role of Satpol PP in upholding public order and public peace in Padang City is carried out through: the role of early detection and prevention, coaching, counseling, patrolling, security, escort, control and handling of protests; (2) In upholding public order and public peace in Padang City, Satpol PP does not determine a fixed schedule, because supervision and control are carried out based on information from intelligence and community reports.*

***Keywords:*** *Satpol PP, Public Order, Hotels*

# KATA PENGANTAR



*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillaahiraabbil’aalamin*, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu Wa Ta’ala, karena berkat Rahmat dan hidayah nyalah, penulis akhirnya dapat menyelasaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG TERJADI DI HOTEL”.** sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin Menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. deaf Wahyuni Ramadhani yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, gagasan, serta arahan dan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H selaku dosen pembimbing yng telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Penguji I dan II Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M. Hum dan Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H yang telah mengarahkan penulis saat ujian seminar proposal.
8. Bapak/Ibu atau dosen-dosen, Bapak/Ibu tenaga kependidikan fakultas hukum universitas bung hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini
9. Kedua orang tua, papa tercinta Arpan Jahfar dan ibu tersayang Hermalina yang selalu memberikan saya support, doa serta kesabarannya yang sangat luar biasa dalam setiap langkah yang di lewati selama perkuliahan penulis, yang merupakan suatu keberuntungan dan anugerah dalam hidup. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada saya.
10. Kepada saudari dan saudara saya Nurmalisa Ramadhani dan Bayu Kurnia Saputra. selalu memberikan dukungan, doa, dan selalu memberi motivasi bagi penulis. Terimakasi atas semuanya bersyukur memiliki kalian dalam hidup saya.
11. Kepada seseorang tidak kalah penting kehadirannya, Muhamad Fadhil Utama. telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal mendukung, dan mendengar keluh kesah, serta semangat untuk pantang menyerah. Beberapa perasaan yang menghangatkan hati: cinta, inspirasi dan Syukur. Sungguh menakjubkan bagaimana kamu memberi semua hal di atas kepada penulis dan pada akhirnya penulis merasa sangat berterimakasih.
12. Kepada sahabat-sahabat kampung saya Salsabilla, Tiara putri yani, ica syafina, Indah Damayanti, Dilla, Sella, Feter Farenza. Terimakasih atas kesenangan, canda tawa, dukungan, doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan selama Perkuliahan Naia Syabila, Shalsabilla Diffa, Ega May Putri, Susanti, Ratna Maresti, Kemala Khairun Nisa, Keisyabob Maharani, Tiara Mardatillah, Intan Khairani Putri, Elza Melwi Landa Fitri, Qana Cut Nur Amalis, Angelita, Lara Nais, Marsya Asifa Putri, Ade Irma Malau. Terimakasih telah memberikan saya banyak pembelajaran, pengalaman, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teruntuk sahabat kkn Saya Syarah Zulkifli, Dina Melawati, Citra Salsabilla, Tiara Anjulia, Rifki Lubis, Allandika Uzra, Robi. Terimakasih telah memberi saya dukungan yang luar biasa dan selalu memberi saya semangat dalam hal apapun untuk tidak menyerah.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. *Amiin yarabbal’alamiin*.

Padang, 1 Februari 2025

Penulis

**Kharisma Oktaviani**

**NPM: 2110012111085**

# DAFTAR ISI

[ABSTRAK ii](#_Toc193068617)

[KATA PENGANTAR iv](#_Toc193068619)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc193068620)

[DAFTAR TABEL lii](#_Toc193068621)

[DAFTAR GAMBAR liii](#_Toc193068624)

[BAB I 1](#_Toc193068625)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc193068626)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc193068627)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc193068681)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc193068684)

[D. Metode Penelitian 7](#_Toc193068687)

[BAB II 11](#_Toc193068700)

[TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc193068701)

[A. Tinjauan tentang Pelanggaran ketertiban umum 11](#_Toc193068702)

1. [Pengertian Ketertiban Umum 11](#_Toc193068703)
2. [Bentuk-bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum 11](#_Toc193068705)
3. [Dampak Pelanggaran Ketertiban Umum 17](#_Toc193068706)
4. [Konsep Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat 20](#_Toc193068707)
5. [Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja: 21](#_Toc193068708)

[B. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja 24](#_Toc193068709)

1. [Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 24](#_Toc193068710)
2. [Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 25](#_Toc193068712)

[C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila 26](#_Toc193068727)

1. [Pengertian Tindak Pidana Asusila 26](#_Toc193068728)
2. [Bentuk-bentuk Tindak Pidana Asusila 27](#_Toc193068730)
3. [Dampak Tindak Pidana Asusila………………...………………..27](#_Toc193068737)

[D. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 28](#_Toc193068745)

1. [Pengertian Penegakan Hukum 28](#_Toc193068746)
2. [Bentuk-bentuk Penegakan Hukum 28](#_Toc193068748)

[BAB III 30](#_Toc193068752)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30](#_Toc193068753)

[A. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang Terjadi di Hotel 30](#_Toc193068754)

[B. Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel 45](#_Toc193068793)

[BAB IV 53](#_Toc193068818)

[PENUTUP 53](#_Toc193068819)

[A. Simpulan 53](#_Toc193068820)

[B. Saran 53](#_Toc193068823)

[DAFTAR PUSTAKA 49](#_Toc193068827)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 3.1 Data Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja Kota Padang. 36](#_Toc193072809)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 2025. 21](#_Toc193072939)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

# Pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan, kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam interaksi sosial dan mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Namun, secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memungkinkan pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang di langgar tersebut.[[1]](#footnote-1) Pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel terkait Tindakan asusila mencakup perilaku melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan aturan hukum yang berlaku di hotel. Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini terjadi dimasyarakat tanpa mempertimbangkan stratifikasi sosial pelaku dan korbannya. Pengaruh lingkungan, latar belakang kejiwaan atau guncangan psikis spontan yang disebabkan oleh rangsangan seksual dapat menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut [[2]](#footnote-2).

# Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari aparat penegak hukum non-yudisial di daerah yang bertanggung jawab atas penegakan tindak pidana asusila. Satpol PP juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan melindungi masyarakat. Dalam upaya Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, tindakan penerbitan non-yudisial dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai ke proses pengadilan. [[3]](#footnote-3)

# Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, terdapat pada Bab 6 tentang Tertib Tempat Usaha Pasal 9 butir (1 dan 2) menyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan” dan “Setiap orang atau badan pemilik rumah sewaan / kos dilarang menggabungkan atau menyatukan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan”. Bab 7 tentang Tuna Sosial Pasal 10 butir (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks”. Bab 8 tentang Pengawasan dan Penertiban Pasal 11 butir (1 dan 2) menyatakan bahwa: “Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dan “Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait, dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

# Kedudukan Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Bab 1 Pasal 1 butir (8 dan 9) menyatakan bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” dan “Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai apparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

# Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Tabel 1. 1 : Data jumlah akomodasi hotel menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang, 2021-2023,

| Klasifikasi Hotel | Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang (Unit) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Hotel Bintang Lima | - | - | - |
| Hotel Bintang Empat | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Hotel Bintang Tiga | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Hotel Bintang dua | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Hotel Bintang Satu | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Hotel Non Bintang | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| Padang | 122,00 | 122,00 | 122,00 |

# Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2025

# Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum adalah kejahatan asusila. Kejahatan asusila adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Apabila dipelajari lebih lanjut, defenisi singkat dan sederhana ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Karena defenisi dan batas-batas “kesusilaan” sangat luas dan dapat berbeda menurut perspektif dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Pada dasarnya, setiap tindak pidana (delik) mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist ethische minimum*).[[4]](#footnote-4)

# Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini terjadi dimasyarakat tanpa mempertimbangkan stratifikasi sosial pelaku dan korbannya. Pengaruh lingkugan, latarbelakang kejiwaan atau guncangan psikis spontan yang disebabkan oleh rangsangan seksual dapat menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. [[5]](#footnote-5)

# Maraknya laporan penyalahgunaan hotel di beberapa wilayah Kota Padang sebagai ajang kriminal atau lokasi perbuatan asusila mendapat perhatian serius dari Satpol PP. Satpol PP menilai penyalahgunaan hotel tersebut akibat terjadinya pelanggaran peraturan yang berlaku di Kota Padang oleh para pelaku bisnis perhotelan. Pada umumnya, Satpol PP melakukan razia atau penggeledahan di hotel atau penginapan setelah mendapat pengaduan dari masyarakat sekitar yang mengkhawatirkan atau melihat langsung tindak pidana yang terjadi di hotel atau penginapan tersebut. Oknum-oknum yang tertangkap razia akan ditahan di Polsek setempat untuk diidentifikasi dan dilatih. Setelah itu, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi.

# Jika mereka tertangkap kembali di kemudian hari, mereka akan diproses secara hukum dan diancam dengan sanksi yang lebih serius. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur hukuman bagi pasangan yang terlibat seks atas dasar suka sama suka yang keduanya belum menikah yang melakukan seks bebas. Namun, fenomena yang terjadi adalah banyak pasangan tamu hotel yang bukan pasangan resmi yang tertangkap saat razia. Tuntutan dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pasangan resmi seseorang yang terlibat seks bebas di mana salah satu pasangan itu atau dua-duanya sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah secara hukum.

# Satpol PP melakukan razia asusila gabungan yang dilakukan di kota berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa tersebut. Kepala Satpol PP Kota Padang Mursalim, melakukan razia di sejumlah lokasi mulai dari tempat hiburan malam serta penginapan yang ada di Kota Padang, karena terindikasi telah melakukan pelanggaran ketertiban. Pihaknya melakukan operasi Razia pada hari minggu 9 Oktober 2022 di sejumlah penginapan pun didapati pasangan ilegal yang berhasil dijaring petugas, dibeberapa hotel dan penginapan di kota padang yaitu hotel berbintang tiga di Kelurahan Pondok. Petugas menemukan pasangan bukan suami istri sebanyak 31 orang ditertibkan petugas, diantaranya 17 orang wanita dan 14 orang laki-laki berhasil diamankan dari sejumlah lokasi yang dilakukan pemeriksaan. Petugas langsung membawa mereka ke mako Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan proses lanjut, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Padang. Selanjutnya dilakukan tes darah melalui Dinas kesehatan puskesmas seberang Padang untuk mencegah penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kota Padang[[6]](#footnote-6).

# Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi Satpol PP kota padang sebagai penegak peraturan daerah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 dititik beratkan pada:

# Tertib jalan angkutan jalan

# Tertib jalur hijau taman dan tempat umum

# Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan

# Tertib pedagang kaki lima (PKL)

# Tertib tempat usaha

# Tuna sosial [[7]](#footnote-7)

# Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG TERJADI DI HOTEL”.

## Rumusan Masalah

# Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?

# Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?

## Tujuan Penelitian

# Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.

# Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.

## Metode **Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[[9]](#footnote-9).

1. Sumber data

# Data primer

# Menurut M. Iqbal dan Hasan, data primer adalah data yang didapatkan dari tangan pertama subjek penelitian secara langsung di lapangan[[10]](#footnote-10). Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer melakukan wawancara langsung Salah satunya dengan bapak Efrizal S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Padang.

# Data sekunder

# Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya[[11]](#footnote-11). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data statistik pelanggaran ketertiban umum di hotel 5 tahun belakang dari Satpol PP kota padang dari tahun 2019-2024. Jumlah akomodasi hotel menurut klasifikasi hotel di Kota Padang, menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang terdapat 122 hotel.[[12]](#footnote-12)

1. Teknik pengumpulan data

# Studi dokumen

# Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.[[13]](#footnote-13)

# Wawancara

# Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara dalam proses interview ada dua pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview atau informan (responden). Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber. [[14]](#footnote-14)

1. Teknik analisis data

# Dalam penelitian ini, analisis data di lakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati[[15]](#footnote-15). Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan tentang Pelanggaran ketertiban umum

### Pengertian Ketertiban Umum

# Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Sementara itu ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.[[16]](#footnote-16)

### Bentuk-bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum

Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merujuk pada tindakan yang mengganggu kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan sosial yang berlaku di masyarakat. Berikut merupakan bentuk pelanggaran ketertiban umum secara umum dan bentuk pelanggaran ketertiban umum di Hotel:

1. Pelanggaran Lalu Lintas
2. Melanggar aturan lalu lintas: Seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, parkir sembarangan, atau melawan arus yang dapat menyebabkan kecelakaan dan gangguan ketertiban di jalan.
3. Penggunaan jalan yang tidak sesuai: Seperti kendaraan bermotor yang memasuki jalur pejalan kaki atau sepeda.
4. Keramaian dan Kebisingan
5. Suara bising yang mengganggu: Seperti musik keras, suara kendaraan yang berisik, atau keramaian yang berlebihan di tempat umum pada malam hari.
6. Perayaan tanpa izin: Mengadakan acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang tanpa izin, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.[[17]](#footnote-17)
7. Pelanggaran Kebersihan dan Lingkungan
8. Pembuangan sampah sembarangan: Membuang sampah di jalan, tempat umum, atau sungai yang menyebabkan pencemaran dan ketidaknyamanan.
9. Pembakaran sampah sembarangan: Aktivitas membakar sampah yang dapat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan masyarakat.
10. Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol
11. Penggunaan narkoba: Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang merusak moral dan menyebabkan kerusakan sosial.
12. Minuman keras tanpa izin: Konsumsi alkohol di tempat umum atau di tempat yang dilarang, mengganggu ketertiban dan menciptakan potensi kerusuhan.
13. Tindak Kekerasan dan Kejahatan
14. Perkelahian dan kekerasan fisik: Terjadi perkelahian atau penganiayaan antar individu atau kelompok yang menimbulkan ketegangan di masyarakat.
15. Kejahatan jalanan: Seperti perampokan, pencurian, atau pemalakan yang menimbulkan ketakutan dan kerugian materiil bagi korban.
16. Pelanggaran Sosial dan Moral
17. Prostitusi dan pelacuran: Praktik prostitusi yang dapat merusak moral masyarakat dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.
18. Penyebaran pornografi: Baik dalam bentuk gambar, video, maupun tulisan yang merusak norma sosial dan moral.
19. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks)
20. Menyebar berita bohong: Informasi yang salah atau tidak terverifikasi yang bisa menyebabkan kepanikan, ketegangan, atau konflik antar individu atau kelompok.
21. Penyalahgunaan Ruang Publik
22. Menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi: Misalnya, membuka usaha atau kegiatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat tanpa izin atau peraturan yang jelas.
23. Pembangunan ilegal: Mendirikan bangunan atau konstruksi tanpa izin yang merusak pemandangan dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar.
24. Kerusuhan dan Aksi Unjuk Rasa yang Tidak Tertib
25. Aksi unjuk rasa yang anarkis: Mengadakan demonstrasi atau aksi massa yang berakhir dengan kerusuhan, pengrusakan fasilitas umum, atau kekerasan.
26. Kerusuhan antar kelompok: Konflik antar kelompok atau individu yang memicu kerusuhan yang melibatkan masyarakat secara luas.
27. Pelanggaran terhadap Ketentraman Agama dan Kepercayaan
28. Tindakan yang mengganggu keyakinan agama: Seperti menghina agama atau simbol-simbol agama yang dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat.
29. Diskriminasi sosial: Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, ras, atau kepercayaan yang dapat memicu ketegangan sosial.

Bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban umum di hotel:

1. Penyalah gunaan Fasilitas Hotel  
   Pengunjung kadang menggunakan fasilitas hotel untuk kegiatan yang tidak sesuai, seperti perbuatan asusila atau penyalahgunaan minuman keras. Hal ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan hotel.
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Penginapan  
   Hotel harus memastikan bahwa tamu yang menginap adalah pasangan suami istri. Menerima tamu yang tidak memenuhi syarat ini dapat menyebabkan tindakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan laporan masyarakat.[[18]](#footnote-18)
3. Ketidak patuhan Terhadap Protokol Keselamatan  
   Hotel wajib menyediakan sarana keselamatan dan keamanan bagi tamu. Kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dalam hal ini, seperti tidak adanya pengawasan di kolam renang, dapat mengakibatkan tuntutan hukum.[[19]](#footnote-19)
4. Pengabaian Kebersihan dan Kesehatan  
   Hotel harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pelanggaran dalam hal ini, seperti membuang sampah sembarangan, dapat dikenakan sanksi administratif.
5. Tindakan Kriminal di Dalam Hotel  
   Kegiatan kriminal seperti pengedaran narkoba atau prostitusi yang terjadi di dalam hotel merupakan pelanggaran serius terhadap ketertiban umum dan dapat dikenakan sanksi hukum.[[20]](#footnote-20)
6. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan  
   Hotel yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan perizinan yang berlaku juga termasuk dalam kategori pelanggaran ketertiban umum, yang dapat berujung pada penutupan atau sanksi dari pemerintah.[[21]](#footnote-21)

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidaknyamanan, keresahan, dan ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai.[[22]](#footnote-22)

Pelanggaran ketertiban umum terdapat pada Pasal 503-505 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum masuk ke dalam buku 2 tentang kejahatan dan Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang defenisi, unsur-unsur, serta hukuman pidana bagi pelanggar ketertiban umum menyatakan bahwa:

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barang siapa membiki ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.
2. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan untuk siding pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Pasal 504

1. Barang siapa mengemis di muka umum, siancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505

1. Barangsiapa bergendangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.[[23]](#footnote-23)

### Dampak Pelanggaran Ketertiban Umum

Pelanggaran ketertiban umum dapat menimbulkan berbagai dampak negative dari individu, masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. Ketidaknyamanan dan Keresahan Masyarakat

Pelanggaran seperti kebisingan, perkelahian, atau tindakan kriminal lainnya menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menciptakan suasana yang tidak aman[[24]](#footnote-24)

1. Peningkatan Kejadian Kriminal

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan di suatu daerah. Ketika pelanggaran tidak ditindaklanjuti, hal ini dapat mendorong individu lain untuk melakukan tindakan serupa.[[25]](#footnote-25)

1. Kerusakan Fasilitas Umum

Tindakan vandalisme atau perusakan fasilitas publik mengakibatkan kerugian finansial bagi pemerintah dan masyarakat. Perbaikan fasilitas yang rusak memerlukan biaya yang dapat membebani anggaran daerah.[[26]](#footnote-26)

1. Gangguan Kesehatan Mental

Keresahan yang ditimbulkan oleh pelanggaran ketertiban umum dapat berdampak pada kesehatan mental masyarakat, seperti meningkatnya stres dan kecemasan.[[27]](#footnote-27)

1. Sanksi Hukum dan Administratif

Pelanggaran ketertiban umum sering kali berujung pada sanksi hukum bagi pelanggar, termasuk denda atau hukuman penjara. Ini tidak hanya berdampak pada individu yang melanggar tetapi juga pada reputasi komunitas secara keseluruhan.

1. Konflik Sosial

Pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat memicu konflik antarwarga, terutama jika menyangkut norma-norma sosial atau budaya yang dihargai oleh kelompok tertentu.

1. Penurunan Kualitas Hidup

Secara keseluruhan, pelanggaran ketertiban umum dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, membuat lingkungan menjadi kurang aman dan nyaman untuk ditinggali.

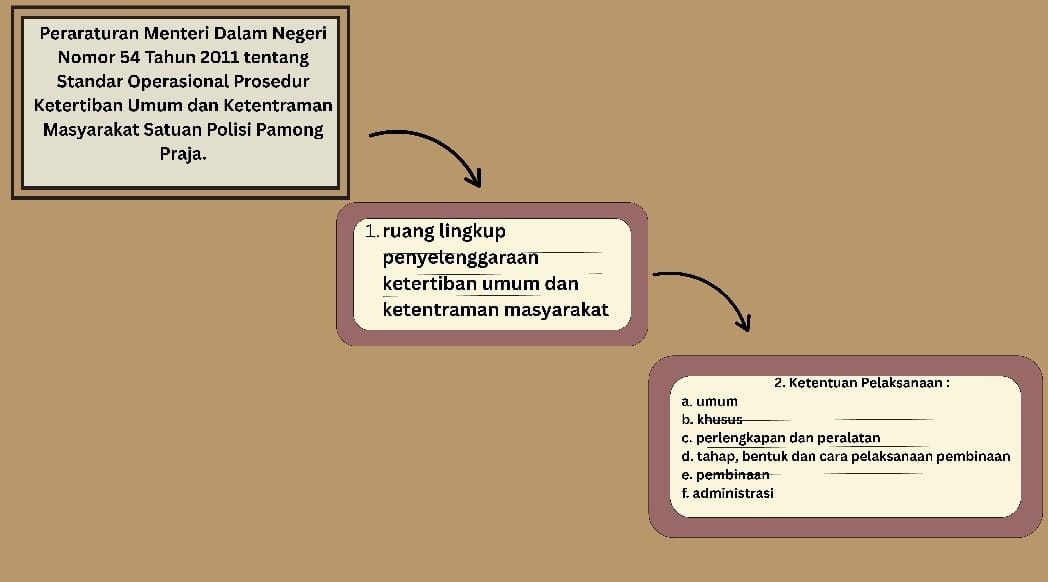
Dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat demi kesejahteraan bersama.

### Konsep Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

Pada dasarnya, kepentingan umum adalah tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan memiliki kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk melakukannya. Ini juga mencakup kepentingan orang banyak, yang mendapatkan aksesnya tidak memerlukan beban tertentu. Ketertiban umum disebut dengan beberapa istilah, seperti orde publik (dalam bahasa Prancis) dan politik publik (dalam bahasa Anglo Saxon). Definisi dan makna ketertiban umum tidak sama di seluruh negara. Ada kalanya, "Ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan" atau "Keadilan" digunakan untuk menggambarkan ketertiban umum.

Namun, kata "ketertiban umum" juga dapat digunakan dalam arti bahwa hakim harus mematuhi undang-undang tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi di mana pemerintah mengharuskan setiap warganya untuk secara konsisten menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman bagi semua orang.[[28]](#footnote-28)

### Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja:



Gambar 2. 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 2025.

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap poin yang tercantum dalam ruang lingkup tersebut:

* 1. Tertib Tata Ruang

Pengaturan penggunaan ruang publik dan area tertentu agar sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan: Meliputi penegakan peraturan tentang zonasi, penggunaan lahan, dan tata letak bangunan untuk mencegah penyalahgunaan ruang.

* 1. Tertib Jalan

Pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan raya untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus kendaraan.

Kegiatan: Penegakan peraturan lalu lintas, pengaturan parkir, dan penanganan pelanggaran yang terjadi di jalan.

* 1. Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pengawasan terhadap kendaraan bermotor dan angkutan umum baik di jalan raya maupun di perairan.

Kegiatan: Memastikan bahwa semua angkutan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk izin operasional dan keselamatan penumpang.

* 1. Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pemeliharaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau serta taman untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan: Penegakan aturan terkait pemanfaatan taman, perlindungan tanaman, serta pengawasan terhadap kegiatan di tempat umum.

* 1. Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pinggir Pantai

Pengelolaan sumber daya air dan area pesisir untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan: Penegakan peraturan mengenai kebersihan sungai dan pantai, serta pengawasan terhadap aktivitas yang merusak ekosistem.

* 1. Tertib Lingkungan

Upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

Kegiatan: Penegakan peraturan tentang pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

* 1. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pengawasan terhadap izin usaha dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang mengatur operasional usaha.

Kegiatan: Memastikan bahwa semua tempat usaha memiliki izin yang sah serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

* 1. Tertib Bangunan

Pengaturan pembangunan fisik bangunan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan: Pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) serta penegakan hukum bagi bangunan yang tidak memenuhi syarat.

* 1. Tertib Sosial

Penegakan norma-norma sosial dalam masyarakat untuk menciptakan suasana harmonis.

Kegiatan: Penanganan konflik sosial, pengawasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau gangguan ketentraman.

* 1. Tertib Kesehatan

Penegakan peraturan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan warga.

Kegiatan: Pengawasan terhadap tempat-tempat umum seperti restoran, pasar, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan standar kesehatan dipatuhi.

* 1. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pengawasan terhadap operasional tempat hiburan agar tidak melanggar peraturan daerah.

Kegiatan: Memastikan bahwa tempat hiburan mematuhi jam operasional, tidak melanggar norma sosial, serta tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

* 1. Tertib Peran Serta Masyarakat

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum.

Kegiatan: Sosialisasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

* 1. Ketentuan Lain Sepanjang Telah Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Masing-Masing

Menyiratkan bahwa setiap daerah dapat memiliki ketentuan tambahan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kegiatan: Penegakan aturan spesifik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi isu unik di wilayah tersebut.

## Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

### Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

# Menurut tata Bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/ merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja adalah Pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. [[29]](#footnote-29) Defenisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai satu badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. [[30]](#footnote-30)

### Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

# Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

# Penyusun program pelaksanaan penegak perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

# Pelaksanaan kebijakan Penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

# Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

# Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

# Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.

# Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar memenuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

# Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah [[31]](#footnote-31)

# Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 yaitu:

# Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

# Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

# Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

# Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah

# Melakukan Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.[[32]](#footnote-32)

## Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila

### Pengertian Tindak Pidana Asusila

# Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain. Arti [asusila](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asusila) menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi dikalangan Masyarakat.[[33]](#footnote-33)

### Bentuk-bentuk Tindak Pidana Asusila

# Banyaknya kasus tindak pidana asusila sangat meresahkan masyarakat dan sering melibatkan kaum Perempuan sebagai korbannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) perbuatan asusila berkaitan dengan seksual terjadi pada Perempuan dapat dilihat misalnya dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

# Pornografi (Pasal 282-283 KUHP),

# Perkosaan (Pasal 285-288 KUHP),

# Perbuatan cabul (Pasal 289-296 KUHP)

# Perdagangan Wanita (pelacuran) (Pasal 297 KUHP)

# Aborsi atau menggugurkan kandungan (Pasal 297 KUHP)

### Dampak Tindak Pidana Asusila

# Perbuatan asusila dapat menimbulkan dampak berturut-turut yang dapat menghambat perkembangan dan Kesehatan. Mengingat dampak negatif dari perbuatan asusila, maka perbuatan tersebut tidak boleh di lakukan oleh remaja. Dampak dari tindak pidana asusila adalah sebagai berikut:

# Dampak Psikologis

# merupakan reaksi pengalaman-pengalaman yang mengguncang, seperti konflik yang dapat menimbulkan perasaan cemas, stress, dan memicu korban untuk bereaksi[[34]](#footnote-34)

# Dampak fisik

# Perbuatan asusila yang dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung diri akan beresiko menular penyakit kelamin pada seseorang atau dikenal dengan Penyakit Menular Seksual (PMS)[[35]](#footnote-35)

# Dampak sosial

# Pelaku dan korban akan mendapat sanksi sosial dimasyarakat dengan dikucilkan dari masyarakat, yang membuat mereka merasa tidak diterima dan rendah diri.[[36]](#footnote-36)

## Tinjauan tentang Penegakan Hukum

### Pengertian Penegakan Hukum

# Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [[37]](#footnote-37)

### Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

# Bentuk-bentuk pendekatan dalam penegakan hukum prefentif dan represif yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berfokus pada sanksi pidana, sementara pendekatan non-penal melibatkan tindakan prefentif di luar sistem hukum pidana[[38]](#footnote-38). Kedua pendekatatan ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.[[39]](#footnote-39)

# Pendekatan penal atau upaya hukum pidana yang terfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menindak pelaku tindak pidana melalui proses hukum. Pendekatan ini bersifat represif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan.[[40]](#footnote-40) Sedangkan pendekatan non-penal atau upaya kebijakan di luar hukum pidana merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana.[[41]](#footnote-41) G Peter Hoefnagels berpendapat bahwa usaha-usaha non penal dengan istilah “*Pervention without Punishment*”.

# Menurutnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah *social policy* (Kebijakan Sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Chil Welfare* (Kesejahteraan Anak-anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.[[42]](#footnote-42)

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peranan Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang Terjadi di Hotel

# Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di hotel kota padang berjalan dengan baik. Tugas-tugas ini memiliki dampak sosial yang luas dan tingkat risiko yang tinggi. Pembinaan dan pengawasan umum Satpol PP terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan memberikan pelatihan kepada personel agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Meskipun kinerja Satpol PP di hotel Kota Padang sudah baik, upaya perbaikan terus menerus diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

# Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu menjalankan pemerintahan daerah. Satuan ini adalah organisasi pemerintah daerah yang berfungsi untuk membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan mereka dan bertindak sebagai pelindung dan garda terdepan dalam hal ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. [[43]](#footnote-43)

# Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota padang, sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan Perda, dan perkada serta menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam menangani permasalahan ini. Satpol PP bertanggung jawab untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan perizinan usaha hotel dan penginapan. Instansi terkait bertanggung jawab atas perizinannya. Selain itu, Satpol PP bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melakukan razia jika ada laporan masyarakat bahwa rumah kos atau penginapan tersebut disalahgunakan fungsinya.

# Petugas Satpol PP melakukan operasi di hotel, terutama hotel kelas melati, dengan tujuan menghentikan penyakit masyarakat seperti prostitusi, perederan minuman keras, perjudian, dan peredaran narkotika.[[44]](#footnote-44) Bapak Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang, menyatakan dalam wawancara:

# “ Peran yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang di lakukan melalui yaitu pertama, melakukan deteksi dan cegah dini  dengan pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi gejala awal masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Hal ini dilakukan melalui kegiatan seperti workshop penguatan fungsi intelijen untuk meningkatkan kapasitas anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pendeteksian dini dan pencegahan dini. Dengan demikian, Satpol PP dapat mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Mereka juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan gangguan sosial.

# Kedua, pembinaan oleh Satpol PP bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman. Pembinaan juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan yang harmonis. Pembinaan ini juga mencakup penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk mendapatkan masukan dan informasi yang diperlukan. [[45]](#footnote-45)

# Ketiga, penyuluhan oleh Satpol PP merupakan bagian dari pembinaan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman. Penyuluhan ini dilakukan melalui kegiatan seperti pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, serta menggunakan media massa untuk menyebarkan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga ketertiban umum dapat terjaga. Penyuluhan juga melibatkan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan potensi masyarakat.

# Keempat, Patroli oleh Satpol PP dilakukan untuk memantau situasi di lapangan dan segera mengambil tindakan jika terdapat gangguan ketertiban umum. Patroli ini dapat dilakukan secara gabungan dengan TNI dan Polri untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan gangguan sosial. Dengan melakukan patroli rutin, Satpol PP dapat menjaga lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat. Patroli juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Selain menjalankan tugas pengawasan dan penertiban secara mandiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan berbagai instansi terkait melalui Tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota).[[46]](#footnote-46) Tim ini terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, serta Satpol PP sendiri, yang bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, Tim SK4 melakukan patroli rutin dan inspeksi di berbagai lokasi yang terindikasi melanggar peraturan daerah (Perda), termasuk hotel, tempat hiburan malam, kawasan perdagangan, serta titik-titik rawan lainnya. Dengan adanya sinergi antara Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya, penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pelasanaannya Satpol PP tidak menentukan jadwal kapan patroli dilakukan tetapi berdasarkan intelegen, serta berdasarkan laporan dari masyarakat langsung kepada pimpinan atau kepada anggota maka Satpol PP akan melakukan patroli dan penertiban langsung ke lokasi, karena Satpol PP bekerja 24 jam.

# Kelima, Pengamanan dan pengawalan oleh Satpol PP bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini dilakukan dengan mengawal kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, seperti acara besar atau unjuk rasa. Dengan demikian, Satpol PP dapat meminimalisir risiko terjadinya gangguan ketertiban umum dan memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Pengamanan dan pengawalan juga melibatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat upaya pengamanan.

# Keenam, Penertiban oleh Satpol PP dilakukan untuk menangani pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengganggu ketertiban umum. Penertiban ini dapat melibatkan tindakan penindakan terhadap pelanggar, seperti memberikan teguran atau surat peringatan. Jika pelanggaran berlanjut, Satpol PP dapat melakukan penertiban secara paksa dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Dengan demikian, ketertiban umum dapat dipulihkan dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis. Penertiban juga melibatkan evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. [[47]](#footnote-47)

# Ketujuh, Penanganan unjuk rasa oleh Satpol PP dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan unjuk rasa berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Hal ini dilakukan dengan mengawal jalannya unjuk rasa, memastikan bahwa peserta unjuk rasa tidak melanggar peraturan yang berlaku, dan mengambil tindakan jika terdapat tanda-tanda kerusuhan. Dengan demikian, Satpol PP dapat meminimalisir risiko terjadinya kerusuhan massa dan memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Penanganan unjuk rasa juga melibatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Polri dan TNI untuk memperkuat upaya pengamanan.

# “Satpol PP tidak memiliki data yang konkret hanya berdasarkan tempat usaha saja, seperti data pemilik hotel, pemilik tempat usaha, dan individu yang tertib secara sosial. “setiap orang di larang mengobjekan atau memperalat anak-anak atau memanfaatkan” “setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur atau berupaya melakukan transaksi sex”. Pada tahun 2024, hampir 400 orang telah terjaring razia Satpol PP. Kemudian “setiap orang dilarang mengamen disetiap jalan”, “setiap orang dilarang berpelukan dan berciuman didepan umum”. Hotel merupakan ranah privasi, sehingga Satpol PP tidak dapat mengganggu, melainkan hanya dapat memberikan analogi.[[48]](#footnote-48) Berikut adalah data laporan penegak peraturan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Tabel 3. 1 Data Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja Kota Padang.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KEGIATAN** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MEI** | **JUN** | **JUL** | **AGUS** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DES** | **BENTUK PENEGAKAN** | | | **JUMLAH KASUS** | **KETERANGAN** |
| **NON YUSTISI** | **YUSTISI** | **DINSOS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | **PENYAKIT MASYARAKAT:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ditertibkan di Hotel | 14 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 65 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 137 | - | 10 | 147 |  |
|  | **JUMLAH** | **14** | **6** | **10** | **7** | **8** | **6** | **65** | **9** | **13** | **1** | **6** | **2** | **137** | **-** | **10** | **147** |  |

Sumber: Data Satpol PP Kota Padang, 2025

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan di tingkat daerah dan dalam negeri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, serta menciptakan ketenteraman di tengah masyarakat. Tugas ini dilakukan melalui berbagai tindakan preventif, pengawasan, dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

# Terkait dengan ketertiban umum di lingkungan hotel, Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 sebenarnya tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan asusila yang terjadi di dalam hotel. Sebaliknya, peraturan ini lebih menyoroti aspek perizinan dan pengelolaan tempat usaha, termasuk hotel dan penginapan. Dengan demikian, regulasi mengenai ketertiban umum di hotel lebih cenderung berfokus pada aspek operasional tempat usaha daripada langsung menindak perbuatan asusila yang mungkin terjadi di dalamnya.

# Namun, dalam praktiknya, aturan mengenai ketertiban umum di hotel dapat berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menertibkan tempat usaha yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah anak di bawah umur dan remaja yang memasuki hotel atau penginapan tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena berpotensi berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan moral. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Dinas Pariwisata, untuk melakukan pengawasan terhadap operasional hotel serta memastikan bahwa tempat usaha tersebut tidak menjadi sarana bagi aktivitas yang melanggar aturan atau norma yang berlaku.[[49]](#footnote-49)

# Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai institusi yang bertugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap berbagai tempat usaha, termasuk hotel dan penginapan. Tugas ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan norma serta peraturan daerah yang berlaku.

# Meskipun Satpol PP secara rutin melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, dalam program kerja resminya tidak terdapat kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan ketertiban umum di dalam hotel. Pengawasan terhadap hotel dan penginapan umumnya dilakukan berdasarkan dua faktor utama, yaitu laporan masyarakat serta hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan.

# Upaya yang dilakukan Satpol PP untuk mencegah pelanggaran ketertiban umum dihotel berbintang di lakukan dengan menjaga keaman, dan ketertiban. Sesuai dengan aturan, Satpol PP tidak boleh menggeledah seluruh kamar hotel berbintang. Namun, jika hotel tersebut tidak berbintang atau ada kendaraan luar kota atau luar daerah yang mencurigakan, maka Satpol PP bisa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kamar.[[50]](#footnote-50)

# Dalam kasus ini, Satpol PP dapat meminta bantuan dari resepsionis untuk mengidentifikasi kamar yang terindikasi mencurigakan. Pemeriksa hanya dapat dilakukan jika ada dasar yang kuat dan bukti yang jelas. Memang, dengan mengetuk seluruh kamar dan membangunkan pengunjung bisa mengganggu kenyamanan, terutama bagi tamu yang baru datang dari tempat yang jauh dan membutuhkan istirahat. Hal ini bisa menjadi masalah dalam menjaga kenyamanan pengunjung. Namun, jika ada indikasi kuat seperti praktik prostitusi online, Satpol PP tetap akan menindaklanjutinya, meskipun itu terjadi di hotel berbintang. Tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan hotel itu sendiri.

# Tugas utama Satpol PP dalam menangani pelanggaran ketertiban umum memang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan dalam negeri. Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah (perda) yang mencakup berbagai hal, seperti pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol), pengawasan terhadap rumah kos, menjaga ketertiban lingkungan, serta penegakan peraturan terkait bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau melanggar ketentuan yang ada. Satpol PP juga berperan dalam menjaga ketertiban di ruang publik dan melaksanakan tugas lain yang mendukung terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. [[51]](#footnote-51)

# Selain berperan dalam menegakkan peraturan kepala daerah, seperti Keputusan Wali Kota, Surat Edaran Wali Kota, serta Imbauan Wali Kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki tugas utama dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di tengah masyarakat. Tugas ini dilakukan dengan berbagai tindakan preventif, pengawasan aktif, serta penegakan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

# Sebagai contoh, selama bulan Ramadan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menindak berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti aktivitas bermain kembang api atau mercon yang berisiko menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Meskipun tidak terdapat sanksi langsung berupa denda atau hukuman pidana, Satpol PP dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut tanpa adanya pengembalian kepada pemiliknya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan serta meminimalisir risiko kecelakaan atau insiden yang dapat terjadi akibat penggunaan bahan peledak secara sembarangan.

# Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2026, Satpol PP kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menangani berbagai bentuk gangguan ketertiban umum, seperti tawuran antar kelompok, aksi vandalisme, serta balap liar yang sering kali meresahkan masyarakat. Peraturan ini juga menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar, sehingga upaya penertiban dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memiliki efek jera bagi pelaku pelanggaran.

# Selain menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengawasan, tugas pokok Satpol PP juga mencakup aspek perlindungan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, Satpol PP tidak hanya berperan dalam menertibkan pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa warga merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, pengendalian potensi konflik sosial, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban yang memerlukan tindakan segera.[[52]](#footnote-52)

# Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak manajemen hotel dalam menangani pelanggaran ketertiban umum dilakukan melalui rapat organisasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sebagai wadah resmi bagi industri perhotelan, PHRI menaungi berbagai hotel yang beroperasi di suatu daerah, sehingga setiap hotel yang tergabung dalam organisasi ini memiliki kewajiban untuk mengikuti regulasi dan standar yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun oleh PHRI itu sendiri.

# Melalui koordinasi dengan PHRI, Satpol PP dapat memperoleh data terkait hotel-hotel yang beroperasi di wilayahnya, termasuk informasi mengenai kepemilikan, izin usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi daerah. Data ini sangat penting dalam membantu Satpol PP melakukan pengawasan serta memastikan bahwa setiap hotel menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# Jika Satpol PP menerima informasi atau laporan dari masyarakat mengenai keresahan yang disebabkan oleh aktivitas di suatu hotel misalnya indikasi adanya pelanggaran seperti praktik asusila, peredaran narkoba, atau gangguan ketertiban lainnya Satpol PP dapat segera menindaklanjuti dengan menghubungi pihak manajemen hotel untuk melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran laporan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang tidak berdasar serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[[53]](#footnote-53)

# Selain menangani laporan masyarakat, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin operasional hotel. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan apakah hotel memiliki izin usaha yang sah, apakah izin tersebut masih berlaku, serta apakah operasional hotel sudah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang usaha perhotelan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti izin yang telah kedaluwarsa atau pelanggaran terhadap aturan zonasi dan tata ruang, maka Satpol PP dapat memberikan teguran hingga rekomendasi penutupan jika pelanggaran tersebut tidak segera diperbaiki.

# Melalui pengawasan dan koordinasi ini, Satpol PP memastikan bahwa hotel dan tempat usaha lainnya tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar, serta tetap beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara dunia usaha dan ketertiban umum, sehingga industri perhotelan dapat berkembang tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar.[[54]](#footnote-54)

# Jika Satpol PP menemukan indikasi pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat atau hasil pengawasan di lapangan, maka langkah tindak lanjut akan segera diambil berdasarkan bukti yang ditemukan. Sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai organisasi yang menaungi industri perhotelan, guna memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mengacu pada peraturan daerah (Perda) yang relevan.

# Dalam hal penggerebekan atau penertiban, Satpol PP bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap langkah yang dilakukan, mulai dari proses investigasi awal, pengumpulan bukti, hingga pelaksanaan tindakan di lapangan, harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap hotel yang diduga melanggar ketertiban umum dilakukan dengan memastikan adanya dasar yang kuat, baik melalui pemantauan langsung maupun melalui laporan dari pihak terkait, seperti kepolisian atau instansi lain yang berwenang.

# Jika dalam proses pengawasan ditemukan bukti yang cukup kuat bahwa sebuah kamar hotel digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan, seperti praktik prostitusi ilegal, peredaran narkoba, atau tindak kriminal lainnya, Satpol PP dapat melakukan penggeledahan dengan tetap menghormati hak-hak tamu serta menjaga privasi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam regulasi. Koordinasi dengan pihak hotel sangat penting dalam tahap ini, agar proses penertiban dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gangguan yang lebih luas.

# Selain itu, jika ditemukan pelanggaran administratif seperti operasional hotel tanpa izin resmi atau pelanggaran terhadap aturan zonasi dan tata ruang, Satpol PP juga dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penyegelan sementara, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pihak berwenang. Semua tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hotel atau tempat penginapan beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.[[55]](#footnote-55)

# Dengan adanya koordinasi yang baik antara Satpol PP, PHRI, serta instansi terkait lainnya, diharapkan setiap pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan efektif, sehingga ketertiban umum serta keamanan masyarakat tetap terjaga tanpa menghambat industri perhotelan yang beroperasi secara legal.

# Di beberapa lokasi, ditemukan keberadaan oknum tertentu yang berperan sebagai penjaga keamanan ilegal, yang bertindak di luar kewenangan resmi dan justru melindungi aktivitas yang melanggar aturan. Keberadaan oknum ini sering kali menghambat proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam kasus seperti ini, Satpol PP dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diproses secara lebih lanjut.

# Jika dalam proses penertiban ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring), seperti pelanggaran izin usaha, gangguan ketertiban umum, atau pelanggaran Perda lainnya, maka kasus tersebut dapat diserahkan kepada PPNS dan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Dengan demikian, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa denda administratif, teguran tertulis, atau hukuman lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

# Jika terdapat keluhan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran di suatu hotel, baik yang disampaikan melalui kelurahan, kecamatan, atau kanal aduan resmi, Satpol PP akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengawasan khusus akan dilakukan terhadap hotel atau penginapan yang dilaporkan menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti dugaan praktik yang bertentangan dengan peraturan daerah atau norma sosial.[[56]](#footnote-56)

# Tindakan lebih lanjut akan bergantung pada hasil pengawasan di lapangan serta bukti yang diperoleh dari laporan masyarakat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka Satpol PP dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian atau Dinas Pariwisata, untuk menentukan langkah penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel

# Dalam pelaksanaan kebijakan Satpol PP terkait pengawasan, hal tersebut telah berjalan dengan baik, tidak menemukan kendala baik yang berasal dari pihak kecamatan, instansi terkait, maupun faktor eksternal lainnya. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sumber daya manusia yang terlatih, telah tersedia dan dalam kondisi yang memadai. Juga bergantung pada lokasi. Jika di lokasi tersebut terdapat individu yang diamankan dan tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka mereka akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Satpol PP bertindak sebagai Pembina dan akan mengembalikan mereka kepada keluarga yang bersangkutan.

# Dalam upaya penegakan hukum, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas terhadap pemilik usaha yang diketahui atau diduga dengan sengaja membiarkan, mendukung, atau bahkan memfasilitasi praktik ilegal di tempat usaha mereka. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti kuat bahwa pemilik usaha terlibat atau tidak mengambil langkah pencegahan, maka tindakan hukum akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik usaha yang terbukti bersalah akan dikenakan proses tindak pidana ringan (tipiring) dan diwajibkan menghadiri persidangan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

# Selanjutnya, pemilik hotel akan dipanggil oleh Satpol PP dan diminta untuk membuat surat pernyataan. Memang, dalam aturan yang ada, hotel tidak mengatur secara spesifik mengenai status pernikahan pengunjung, apakah sudah menikah atau belum. Tergantung pada sikap pengusaha, jika ia sengaja membiarkan hal tersebut, makai sudah melanggar norma agama. Namun, sebagai Satpol PP, tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap pemilik usaha hotel tersebut. [[57]](#footnote-57)

# Mengenai apakah proses tersebut berjalan atau tidak, Satpol PP tidak menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Satpol PP tidak menyebarkan atau membagikan data secara rinci. Yang dapat disampaikan hanya jumlah hotel yang terjaring razia pertahun. Nama hotel tidak dapat di berikan karena itu bersifat privasi dan terkait dengan kode etik. Begitu pula, identitas orang yang tertangkap saat razia juga tidak diungkapkan. Hanya yang di laporkan jumlah keseluruhan, misalnya dalam satu tahun ada 130 hotel yang terjaring, dan dari jumlah tersebut, berapa yang dikenakan Tindakan tipiring. [[58]](#footnote-58)

# Seperti halnya prostitusi online yang terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan dan dilakukan sebagai mata pencarian, pemilik tempat usaha akan dibuatkan surat pernyataan. Tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap pemilik usaha tersebut untuk mencegah praktik yang melanggar hukum dan norma.

# Selanjutnya, penyelesaian dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan melalui inteligen. Jika tempat usaha masih menerima praktik-praktik tersebut, maka akan dilaporkan ke pihak perizinan untuk ditindaklanjuti. Tindakan yang diambil bisa berupa pencabutan izin usaha hotel tersebut atau pembekuan izin sementara, sesuai dengan keputusan pihak perizinan, yang memiliki kewenangan atas hak-hak usaha tersebut.

# Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara aktif melakukan pengawasan dan penertiban di berbagai lokasi yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya aktivitas yang melanggar peraturan daerah atau hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup inspeksi langsung ke lapangan, pemantauan aktivitas yang mencurigakan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

# Sebagai contoh, di wilayah Koto Tangah dan Pasir Jambak, Satpol PP melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah tempat usaha yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal. Jika ditemukan indikasi bahwa pemilik usaha memiliki pengetahuan mengenai praktik tersebut tetapi memilih untuk mengabaikan, atau bahkan secara aktif menyediakan fasilitas pendukung, misalnya dengan menyediakan alat kontrasepsi sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ilegal, maka hal ini akan menjadi fokus utama penyelidikan dan tindakan hukum lebih lanjut.

# Namun, hingga saat ini, Satpol PP belum menemukan bukti konkret atau temuan yang menguatkan dugaan keterlibatan pemilik usaha dalam praktik ilegal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aturan dan hukum yang berlaku tetap ditegakkan dengan baik.

# Satpol PP tidak menerapkan jadwal tetap dalam melakukan pengawasan dan penertiban, mengingat pendekatan yang digunakan lebih bersifat situasional dan responsif terhadap perkembangan di lapangan. Tindakan penertiban umumnya dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari intelijen lapangan serta laporan yang masuk dari masyarakat. Hal ini memungkinkan Satpol PP untuk lebih fleksibel dalam merespons berbagai potensi gangguan ketertiban umum yang muncul.

# Sebagai contoh, apabila masyarakat mengajukan laporan mengenai gangguan ketertiban di wilayah Padang Barat, baik itu terkait aktivitas ilegal, pelanggaran izin usaha, atau keresahan yang disebabkan oleh tindakan individu atau kelompok tertentu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan segera menanggapi laporan tersebut tanpa menunggu waktu tertentu. Satpol PP beroperasi selama 24 jam sehari, siap untuk merespons setiap situasi yang memerlukan tindakan segera guna memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.

# Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga keamanan publik. Mereka tidak hanya melakukan penegakan hukum secara represif, tetapi juga melakukan tindakan preventif, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara di lokasi-lokasi yang sering terjadi pelanggaran. Dengan demikian, Satpol PP berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh warga.

# Meskipun Peraturan Daerah (Perda) baru telah diparipurnakan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat ini peraturan tersebut masih berada dalam proses administrasi untuk mendapatkan nomor resmi. Proses ini merupakan tahapan standar dalam penerbitan regulasi daerah, yang mencakup penomoran dan publikasi resmi agar Perda dapat dijadikan acuan hukum yang sah.[[59]](#footnote-59)

# Setelah proses administrasi selesai, Perda akan diundangkan dalam lembaran daerah, yang menandai berlakunya peraturan tersebut. Proses pengundangan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.

# Diharapkan bahwa dalam waktu dekat, nomor resmi untuk Perda tersebut akan segera diterbitkan, sehingga dapat langsung diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan adanya Perda ini, Satpol PP diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

# Melalui kesiapan operasional yang optimal dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional, responsif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

# Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan ketertiban umum, di mana mereka bertanggung jawab untuk menanggapi laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban. Dengan dukungan dari peraturan daerah yang telah disahkan, Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Mereka beroperasi selama 24 jam dan siap merespons setiap situasi yang memerlukan tindakan cepat.

# Koordinasi yang baik antara Satpol PP dan instansi lain, termasuk kepolisian, sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan lancar. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kejelasan dalam pembagian kewenangan antara Satpol PP dan kepolisian, sering kali terjadi miskomunikasi dan kurangnya koordinasi di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mencapai tujuan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, komitmen Satpol PP untuk beroperasi secara profesional dan responsif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta menjaga ketertiban umum sesuai dengan regulasi yang berlaku.[[60]](#footnote-60)

# Peraturan Daerah (Perda) yang baru ini mengadaptasi beberapa ketentuan dari Perda sebelumnya, khususnya Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol. Dalam peraturan yang diperbarui ini, tidak hanya denda yang diberlakukan sebagai sanksi, tetapi juga sanksi administratif. Penambahan sanksi administratif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena denda dapat dikenakan tanpa harus melalui proses pengadilan.

# Dengan adanya sanksi administratif, Satpol PP dapat lebih responsif dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Hal ini memberikan kemudahan dalam proses penegakan hukum, di mana tindakan dapat diambil secara langsung terhadap pelanggar tanpa menunggu keputusan pengadilan yang sering kali memakan waktu lama.

# Implementasi dari Perda ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat, serta mengurangi potensi pelanggaran yang sebelumnya sulit ditindaklanjuti. Dengan demikian, keberadaan Perda baru ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat saat ini.

# Selain itu, perda yang baru juga mengatur hal terkait LGBT, mencakup berbagai kategori, seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan transgender. Perda ini menambahkan sanksi administratif, yang memungkinkan pelanggar untuk didenda setelah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanpa perlu dibawa ke pengadilan.

# Salah satu ketentuan penting dalam perda baru ini, terutama pada Pasal 21, mengharuskan setiap orang yang berkunjung ke rumah dalam waktu 24 jam untuk melapor kepada RT/RW. Dulu, ketentuan ini tidak memiliki sanksi, tetapi sekarang telah diberlakukan sanksi administratif bagi yang melanggar.[[61]](#footnote-61)

# Satpol PP dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggar ketertiban umum di hotel. Berupa  teguran lisan atau tertulis kepada pemilik hotel yang melanggar peraturan. Jika pelanggaran berlanjut, surat peringatan akan dikeluarkan untuk mendorong kepatuhan. Denda dapat dikenakan kepada hotel yang melanggar ketentuan, dengan jumlah yang bervariasi. Dalam beberapa kasus, denda administratif berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 untuk pelanggaran tertentu. Jika pelanggaran tidak diperbaiki setelah teguran dan denda, pihak berwenang dapat memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional hotel, termasuk penyegelan fasilitas. Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, pencabutan izin usaha hotel dapat dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menegakkan ketertiban umum.

# BAB IV

# PENUTUP

## Simpulan

# Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang dilakukan melalui: peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana.

# Semua sarana dan personel sudah memadai dan tidak ada kendala. Satpol PP tidak menentukan jadwal tetap, karena pengawasan dan penertiban dilakukan berdasarkan informasi dari intelijen dan laporan masyarakat.

## Saran

# Agar Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menambahan jumlah personil Satpol PP sehingga Satpol PP dalam menjalankan perannya dapat maksimal dengan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kota Padang.

# Agar Satpol PP melakukan pendidikan atau pelatihan khusus terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota padang secara berkesinambungan.

# Agar Pemerintah Daerah Kota Padang meningkatkan pengawasan terhadap hotel-hotel yang beroperasi tanpa izin. Ini termasuk pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa semua dokumen perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Hotel (IUHP), telah dipenuhi.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku-buku

# Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

# Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, RajaGrafindo Persada*, Jakarta

# Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta

# Anggraini, 2018, *Desain Komunikasi Visual: Dasar-dasar panduan Untuk Pemula*, Penerbit Nuasa, Bandung

# Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kebijakan Dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP, Semarang

# Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusupan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

# Dian Maya Saputri, 2018, *Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data, Program Sarjana Universitas Yogyakarta*, Yogyakarta

# Gerson W. Bawengan, 1997, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta

# M. Iqbal dan Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Ghalia Indonesia*, Bogor

# Peraturan Perundang-Undangan

# Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

# Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

# Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

# Sumber Lainnya

# Andika Oktaviani Saputra, dkk, 2021, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcroded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-*19’Jurnal USM law Review*’, Volume 4, Nomor 1.

# Adibah Amintasria Lasahido, 2021, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provisnsi Jawa Barat, *‘Jurnal Renaissance’,* Volume 6, Nomor 2, hlm. 830.

# Dwikari Nuristiningsih Ependi, 2023, ‘Upaya Penal dan non-penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi ‘*Jurnal Hukum’*, Volume 23, Nomor 2.

# Hukumonline.com, *Defenisi ketertiban umum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>, diakses 3 Februari 2025.

# Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak’*Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2.

# Jdih, 2024, Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsurnya, sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/beritab/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>, diakses 23 Oktober 2024.

# Jimly Asshiddiqie, Penegak hukum, xx<https://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf>, diakses 24 Oktober 2024.

# Kasuistika, 2023, Razia Asusila Gabungan, 16 Orang Diamankan Satpol PP Kota Padang, <https://www.jawapos.com/nasional/amp/01570594/razia-asusila-gabungan-16-orang-diamankan-satpol-pp-kota-padang>, diakses 5 November 2024.

# Muhammad Ilham Effendy, 2020, ‘Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, No 1.

# Qotrun A, 2021, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.

# Rahmawati dkk, 2019, ‘Kajian Kejahatan Amoral Remaja di Palopo City’, *Jurnal Internasional,* Volume 10.

# Rudyanti Dorotea Tobing, 2019, ‘*Morality’*, *Jurnal Hukum,* Volume 5, Nomor 2, hlm 123.

# Sovia Hasanah, 2018, Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP, [hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/), diakses tanggal 11 Juni 2024.

# Universitas PGRI Palangka Raya, 2019, Morality, ‘*Jurnal Ilmu Hukum’,* Volume 2, Nomor 2, hlm. 122.



1. Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gerson W. Bawengan, 1997, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sovia Hasanah, 2018, *Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP*, [hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/), diakses tanggal 11 Juni. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. Gerson W. Bawengan, 1997, *Pengantar Psikologi Kriminil,* Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.22. [↑](#footnote-ref-5)
6. INews Joglo Semar, 2022, *Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung* [Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung](https://joglosemar.inews.id/read/186483/razia-pasangan-mesum-di-hotel-ada-perempuan-berhijab-panik-sibuk-kenakan-kerudung/3), diakses 10 oktober 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Iqbal dan Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Ghalia Indonesia*, Bogor*,* hlm.82. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175. [↑](#footnote-ref-11)
12. Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang (Unit), 2021-2023,* [Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Padang](https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDExIzI=/jumlah-akomodasi-hotel-menurut-klasifikasi-hotel-di-kota-padang.html), diakses 17 Desember 2024. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dian Maya Saputri, 2018*, Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data, Program Sarjana Universitas Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Universitas Islam An Nur Lampung, 2023, *Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas*, [Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas – Blog UI An Nur Lampung](https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html#:~:text=Wawancara%20semi%20terstruktur%20adalah%20metode%20wawancara%20yang%20menggunakan,penambahan%20pertanyaan%20sesuai%20dengan%20situasi%20dan%20respons%20narasumber.)*,* diakses 15 Januari 2025. [↑](#footnote-ref-14)
15. Qotrun A, 2021*, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya,* <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Ilham Effendy, 2020, ‘Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, No 1, hlm. 293. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tirto.id, 2023, *Isi Pasal 503, 504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum*, [Isi Pasal 503, 504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum](https://tirto.id/isi-pasal-503-504-dan-505-tentang-pelanggaran-ketertiban-umum-gBLf#google_vignette), diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rudyanti Dorotea Tobing, 2019, Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan Di Kota Palangka Raya, ‘*Jurnal Ilmu Hukum’,* Volume 5, Nomor 2, hlm 124. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rofika Mahfida Wahyu, 2017, Perlindungan Hukum Mengenai Terjaminnya Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Fasilitas Hotel Sebagai Tempat Wisata, ‘*Jurnal Unesa’,* hlm 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Iqbal Iskandar, 2024, *Isi Pasal 503,504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum*, [Isi Pasal 503, 504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum](https://tirto.id/isi-pasal-503-504-dan-505-tentang-pelanggaran-ketertiban-umum-gBLf), diakses 17 Maret 2025. [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hukumonline.com, *Defenisi ketertiban umum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>, diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-22)
23. Beranda hukum.com, 2020, *Buku Ketiga-Bab II-Pelanggaran Ketertiban Umum,* [Buku Ketiga-Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum - Beranda Hukum](https://berandahukum.com/a/Buku-Ketiga-Bab-II-Pelanggaran-Ketertiban-Umum)*,* diakses 23 Januari 2025. [↑](#footnote-ref-23)
24. Perqara, *Pahami Pengertian Pelanggaran Ketertiban Umum oleh Ormas dan Sanksi Hukumnya,* <https://perqara.com/blog/pengertian-pelanggaran-ketertiban-umum/>, diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bagas Ade Satria, 2020*, Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Prajadi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung,* <http://eprints.ipdn.ac.id/14426/1/Bagas%20Ade%20Satria.pdf>, diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Jumadil, 2022, *Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone,* <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/461/179>, diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kkn Universitas Dipenonegoro, 2022, *Jangan Anggap Sepele! Melanggar Ketertiban Umum Dapat Dikenai Sanksi Administratif Hingga Sanksi Pidana,* <https://kkn.undip.ac.id/?p=356902>, diakses 3 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rudyanti Dorotea Tobing, 2019, ‘*Morality’*, *Jurnal Hukum,* Volume 5, Nomor 2, hlm 123. [↑](#footnote-ref-28)
29. Alwi Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 817. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, hlm. 886. [↑](#footnote-ref-30)
31. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. # Jdih, 2024, *Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsurnya*, sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/beritab/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya> , diakses 23 Oktober 2024.

    [↑](#footnote-ref-33)
34. Anggraini, 2018, *Desain Komunikasi Visual: Dasar-dasar panduan Untuk Pemula*, Nuasa, Bandung, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-34)
35. Rahmawati dkk, 2019, ‘Kajian Kejahatan Amoral Remaja di Palopo *City’, Jurnal internasional,* Volume 10, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid* [↑](#footnote-ref-36)
37. Jimly Asshiddiqie, *Penegak hukum*, <https://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf>, diakses 24 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-37)
38. Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*’Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dwikari Nuristiningsih Ependi, 2023, *‘*Upaya Penal dan non-penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi ‘*Jurnal hukum’*, Volume 23, Nomor 2, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-40)
41. Andika Oktaviani Saputra, dkk, 2021, *‘*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcroded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19’*Jurnal USM law Review’*, Volume 4, Nomor 1, hlm 333. [↑](#footnote-ref-41)
42. Barda Nawawi Arief, 2000*, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kebijakan Dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-42)
43. Adibah Amintasria Lasahido, 2021, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provisnsi Jawa Barat, *‘Jurnal Renaissance’,* Volume 6, Nomor 2, hlm. 830. [↑](#footnote-ref-43)
44. Universitas PGRI Palangka Raya, 2019, Morality, ‘*Jurnal Ilmu Hukum’,* Volume 2, Nomor 2, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-45)
46. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-46)
47. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-47)
48. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-48)
49. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-49)
50. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-54)
55. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-58)
59. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-59)
60. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kota Padang EfrizalS.H Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-61)